

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah adalah isu penting yang memang harus diatasi dengan penanganan secara tepat. Pada proses nya penambahan penduduk dan perubahan suatu pola konsumsi masyarakat dapat menyebabkan atau menimbulkan bertambahnya volume, karakteristik maupun jenis sampah yang semakin beragam. Sampah adalah barang sisa dari aktivitas manusia atau rumah tangga yang sudah tidak lagi terpakai dan dianggap tidak memiliki kegunaan sehingga barang sisa itu harus di buang. Ada dua jenis yang membedakan sampah, adalah sampah organik dan anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang dapat terurai melalui suatu proses alam, tidak halnya dengan sampah anorganik, sampah jenis ini tidak dapat terurai melalui proses alam, sampah ini dapat diatasi dengan upaya pengelolaan yang tepat. Dengan upaya 3R, yaitu kegiatan mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*) (Subekti 2010).

Peningkatan volume sampah di suatu wilayah tanpa diimbangi dengan peningkatan mutu pengelolaan sampah akan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dari sisi kesehatan, sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan penyebaran penyakit sehingga menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Dari segi lingkungan, sampah merupakan sumber pencemaran, baik itu pencemaran air, tanah, maupun udara. Sampah juga dapat menjadi penyebab banjir ketika sampah banyak dibuang ke badan air. Bahkan sampah juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang merupakan pemicu pemanasan global dengan melepaskan gas metan dan karbondioksida. Adanya gas metan dari sampah sangat besar dan rata rata tingginya gas metan ini umumnya disebabkan oleh TPA dengan kondisi basah akibat iklim dan komposisi dari sampah jenis organik yang hampir 60-70%.

Sampah adalah masalah bagi setiap kota, tidak hanya berpotensi merusak lingkungan. Dalam segi sosial, sampah dapat menurunkan stabilitas sebuah kerukunan di dalam masyarakat ketika ada warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya akan merusak maupun mengotori lingkungan sekitar. Lingkungan yang kotor, bau akan membuat ketidak nyamanan di lingkungan suatu masyarakat. Sehingga ini nantinya akan berdampak negatif terhadap sektor sektor yang lain.

Masih tingginya penggunaan kemasan berupa plastik, kertas dan bahan-bahan lainnya menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang per hari sebesar 0,7 kg. KLHK menyebutkan rata-rata timbunan sampah harian di daerah kota metropolitan maupun kota besar yang berjumlah penduduknya lebih dari 500 ribu jiwa adalah 1.300 ton dan 480 ton perhari. Bentuk sampah yang paling dominan adalah sampah organik yang angkanya mencapai kurang lebih 60 persen dari total timbunan sampah, terutama di daerah perkotaan. Bukan hanya menjadi hal yang serius, sampah juga menjadi masalah sosial dan budaya. Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya mengurangi sampah menjadikan hampir di semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam mengolah sampah. Permasalahan sampah sudah menjadi hal serius yang ada di kota-kota besar. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah kota dalam menangani sampah perkotaan. Produksi jumlah sampah di kota dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat, dan jumlah timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Pengelolaan persampahan suatu daerah sangat ditentukan oleh peraturan yang mendukungnya. Peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan membayar retribusi. Macam – macam peraturan daerah yang merupakan dasar hukum bagi pengelolaan persampahan adalah peraturan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan yang ditujukan bagi masyarakat, peraturan daerah mengenai pembentukan institusi formal, dan peraturan daerah yang menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan. (Rizal, 2011)

Suharto (2011) mengatakan pemerintah belum begitu serius dalam memikirkan masalah sampah ini. Meski pemerintah sudah melakukan beberapa terobosan namun di beberapa tempat pembuangan sementara (TPS) gunungan sampah masih sangat mengganggu masyarakat dan masih menjadi perhatian. Salah satu yang berperan dalam pengurangan volume sampah di tempat pembuangan sampah akhir adalah pemulung. Pemulung adalah orang yang, mengumpulkan dan memproses sampah yang ada di jalan-jalan, sungai-sungai, bak-bak sampah dan lokasi pembuangan akhir sebagai komoditas pasar.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Surakarta bahwa adanya rata-rata pada tahun 2016 adalah 298 ton, volume ini terus naik pada tahun berikutnya di tahun 2017

mencapai angka 310 ton sampah per hari. Ini disebabkan karena di Surakarta hanya memiliki satu TPA yang beroperasi di daerah Mojosongo yaitu TPA Putri Cempo, dan ini beresiko sekali mengalami overload atau penumpukan sampah yang tinggi setiap tahunnya.

Jumlah rata rata volume sampah per hari yang berada di TPA Putri Cempo dari tahun ke tahun sedikit mengalami kenaikan di tahun 2016 sampai 2017. Berikut adalah data yang di sajikan oleh penliti dari tahun 2016 – 2019 per harinya.

Tabel 1.1 Jumlah Volume Sampah Di TPA Putri Cempo Surakarta Tahun 2016-2019

No	Tahun	Volumpe sampah (ton)
1	2016	298
2	2017	310
3	2018	306
4	2019	303

(sumber diolah oleh penulis dari DLH Surakarta tahun 2019)

Pada data diatas disebutkan bahwa adanya kenaikan di tahun 2016-2017 tetapi pada tahun 2018-2019 jumlah rata rata perharinya mengalami penurunan. Adanya perubahan yang banyak setiap tahunnya adalah sebuah kebrhasilan di daerah surakarta. Adalah di tahun 2017 awal dari tercetus nya kampung kitiran sehingga menciptakan pemikiran bagaimana menjadikan sebuah kampung yang dinamis. Dari ide tersebut lalu muncul inovasi yang dinilai baik untuk kehidupan di masyarakat.

Dari adanya penumpukan sampah yang terus bertambah dalam empat tahun terakhir yang berada di TPA Mojosongo bukannya memberi jalan keluar untuk mengurangi sampah tetapi malah terus bertambahnya penumpukan sampah di Surakarta. Masalah ini disadari oleh salah satu masyarakat kampung kitiran yang perlahan membereskan masalah sampah di Surakarta. Dengan bantuan masyarakat asli daerah kampung kitiran ini berkerja sama mecanangkan program program baru sehingga mendapatkan hasil yang dapat mengurangi volume sampah di Surakarta.

Hal ini cukup efisien untuk menghidupkan mental baru dalam pengelolaan sampah dengan hal itu kemudian warga sekitar mengelola sampah mereka sendiri di dalam rumah. Memisahkan sampah mereka sendiri dari anorganik, organik dan sampah lainnya seperti sampah yang harus di pisahkan sampai dengan di olah.

Di dalam pengelolaan sampah dapat dipahami bahwa dalam pengelolaannya ini tidak dapat berjalan sendiri, sehingga membutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses atau perubahan cara untuk mengelola. Manajemen dan pengelolaan adalah istilah yang sama (Robert J. Kodoatie 2010). Manajemen adalah sebagai alat koordinasi dari sumber tenaga manusia, material, waktu, dana, metode kerja dan tempat dengan melalui proses-proses seperti perencanaan, pengarahan, dan pengendalian supaya dapat menuju capaian tujuan yang diinginkan (Nawawi 2013). Menurut Robbins dan Mary (2010), pengelolaan ataupun manajemen ini melibatkan aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan dari orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Dengan yang telah dijelaskan di atas, dalam pengelolaan sampah di Kampung Kitiran haruslah melibatkan berbagai pihak. Menggunakan konsep *collaborative governance* adalah menarik untuk dikaji, dengan adanya kolaborasi, kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Adanya tahapan-tahapan dalam pelaksanaan konsep *collaborative governance* telah dijelaskan oleh Morse dan Stephens (2012) yaitu tahapan *assessment*, *implementation*, *initiation* dan *deliberation*. Dengan menggunakan konsep ini yang menggunakan konsep Morse dan Stephens, seharusnya pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah bisa mendukung adanya upaya penanganan dan pengurangan sampah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebuah kerjasama di antara stakeholder yang ada harus dapat melakukan pengurangan dan penanganan sampah secara efektif dan efisien dengan melakukan kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kampung Kitiran.

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan fenomena yang sedang terjadi, maka peneliti tertarik untuk mengkaji *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kampung Kitiran Surakarta atau Solo, dan peneliti juga ingin mengetahui bagaimana proses yang terjadi sehingga kampung ini menjadi kampung rujukan dalam hal pengelolaan sampah di Surakarta menggunakan perspektif *Collaborative Governance*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan menentukan suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana Proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Di Kampung Kitiran Kecamatan Purwosari Kota Surakarta”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Di Kampung Kitiran Kecamatan Purwosari Kota Surakarta”

D. Manfaat Penelitian

1). Manfaat Teoritis

Di dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk bahan kajian mahasiswa ilmu pemerintahan maupun jurusan yang berkaitan dengan tema pada penelitian ini. Khususnya untuk bahan referensi dalam bidang Collaboratibe Governance.

2). Manfaat Praktis

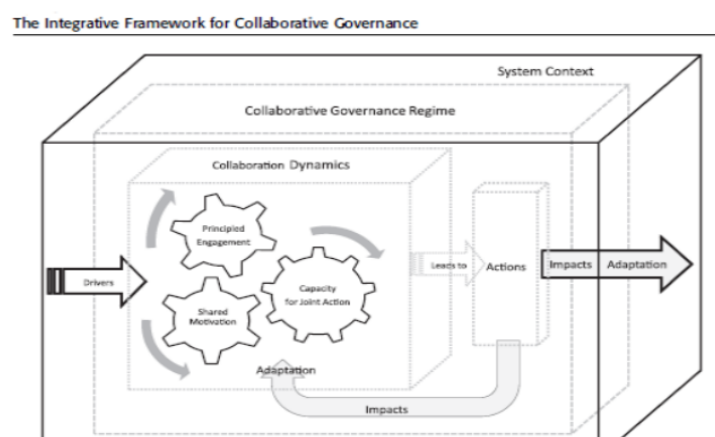
- a. Di dalam masyarakat, semoga penelitian ini bermanfaat untuk wawasan kedepan untuk membangun sebuah daerah mereka
- b. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan bahan referensi maupun bahan masukan dalam menangani pengelolaan sampah di daerah.

E. Landasan Teori

- a. Collaborative Governance

Collaborative governance difokuskan untuk menyatukan pemerintah, swasta dan civil society, serta bagaimana sector – sector yang berbeda ini dapat berkolaborasi secara efektif terlepas dari latar belakang dan kepentingan pribadi. Dalam tata kelola ini didefinisikan sebagai "serangkaian kegiatan koordinasi dan pemantauan" yang memungkinkan kolaborasi atau kemitraan yang efektif. Dalam konteks tata kelola kolaboratif, konsep tata kelola berfokus pada bagaimana ini bekerja melintasi jaringan aktor yang berbeda, baik formal maupun informal, dan bagaimana ini dapat membantu atau menghambat kemajuan kegiatan bersama (Beran et al. 2016). Collaborative Governance tidak terlepas dari peran pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani suatu masalah publik. Beberapa masalah publik kadang lebih efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal apabila diselesaikan dengan kolaborasi dengan beberapa pihak yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Di dalam ilmu administrasi negara, collaborative governance merupakan salah satu terobosan pemerintah yang melibatkan berbagai stakeholders untuk bersama – sama mengambil keputusan dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah publik karena kadang kala pemerintah tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah publik tersebut tanpa bantuan dari pihak atau pemangku kepentingan lain. Menurut Donahue dan Zeckhauses (2011: 4), collaborative governance yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan Negara dengan cara melakukan kolaborasi dengan Ngo maupun masyarakat. Collaborative governance merupakan kegiatan mencapai tujuan bersama yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta.

Kemudian Peneliti memilih teori proses kolaborasi dari Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012), karena melihat komponen yang komprehensif dan tepat digunakan dalam menjawab permasalahan. Teori proses kolaborasi atau *Collaborative Governance Regime* (CGR) menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara, sebelum mengarah pada dampak utama, serta adaptasi terhadap dampak sementara. Menurut Balogh dalam *framework collaborative governance* memiliki beberapa dimensi, setidaknya ada tiga dimensi yaitu system context, konsep *collaborative governance* dan dinamika kolaborasi. Maka dimensi dimensi ini telah digambarkan pada gambar 2.1 seperti berikut:



Gambar 2.1 *Integrative Framework For Collaborative Governance*
(Teori Stephen Balogh)

1. Dimensi pertama adalah system context ini berada di kotak terluar. System context ini menghasilkan peluang-peluang dan batasan-batasan dan mempengaruhi dinamika kolaborasi dalam hal permulaan dan seterusnya. Dari System Context ini nanti juga muncul Driver-driver termasuk kepemimpinan, Insentif Konsekuensi, Ketergantungan dan ketidakpastian, yang membantu menginisiasi dan mengatur arah bagi *Collaborative Governance*.

Dijelaskan diatas bahwa system context adalah kondisi lingkungan yang menanungi collaborative governance. System context adalah bukan merupakan serangkaian dari kondisi awal tetapi sebagai ruang dari sebuah dimensi lainnya. Ini akan membuat kondisi eksternal bisa mempengaruhi dinamika kolaborasi tidak hanya diawal tetapi setiap collaborative governance sedang berjalan, sehingga nantinya dapat menciptakan dan membuka sebuah kemungkinan untuk tantang baru. Di dalam dimensi pertama ini mempunyai setidaknya 6 elemen, yaitu :

a. *Resouce Condition*, sumber daya yang dimiliki bisa ditelaah, apakah dapat diperbaiki ataupun ditingkatkan.

b. *Policy and Legal Framework*, kebijakan dapat berpengaruh penting untuk pedoman sebagai pemangku kepentingan untuk menciptakan pembaruan dalam kolaborasi.

c. *Level of Conflict/Trust* (Konflik antar kepentingan dan tingkat kepercayaan), konflik adalah hal yang wajar dalam kolaborasi, apakah konflik antara kepentingan masing masing pihak yang sedang bekerja sama dapat mempengaruhi kepercayaan sehingga berdampak baik maupun buruk bagi suatu hubungan yang sedang terjalin.

d. *Prior failure to Address Issues* (Kegagalan yang ditemui di awal), ini akan menjadikan sebuah pelajaran di masa depan dari masing masing stakeholder. Sehingga dapat mengembangkan suatu kolaborasi.

e. *Political dynamics/power relations* (Dinamika politik), bagaimana dinamika politik yang mempengaruhi dari jalannya sebuah kolaborasi. dan

f. *Network connectedness* (Jaringan yang terkait). Hubungan jaringan dapat digolongkan kepada manajemen jaringan sebuah cara untuk membangun nilai-nilai kepemimpinan dalam tipe relasi antar aktor yang sifatnya horizontal.

2. Dimensi kedua merupakan bagian dari konsep *collaborative governance* yang terdiri dari dinamika kolaborasi dan aksi kolaborasi. Pada kondisi awal ini dapat lebih baik untuk memfasilitasi antara pemangku kepentingan dan selebihnya bisa mencegah adanya kepentingan antara pemangku kepentingan dan insansi terkait. Dalam framework ini, berbeda dengan kerangka lain yang cenderung menggabungkan *system context* dengan driver tertentu dalam kolaborasi. Tanpa adanya driver maka untuk mencapai kolaborasi bisa saja dapat terhambat dan tak berkembang. Driver mempunyai beberapa komponen komponen yang penting, yaitu :

a. *Leadership*, seorang atau sosok pemimpin harus mempunyai insisiatif untuk membantu mempersiapkan adanya sumberdaya yang ada untuk mendukung berjalannya *collaborative governance*.

b. *Consequential incentives*, Insentif konsekuensial akan mengarah pada adanya bagian internal maupun eksternal drivers untuk jalannya kolaborasi. Dengan adanya insentif maka akan membuat para pemimpin dan anggota anggota yang yang lain dapat bekerjasama dalam membangun kolaborasi.

c. *Interdependence*, kondisi ketika individu dan organisasi tidak dapat mencapai sesuatu dengan usaha dan kapasitas satu pihak, untuk itu mengapa tindakan kolaboratif dapat berkembang untuk dilaksanakan.

d. *Uncertainty*, ketidakpastian menjadi tantangan utama dalam mengelola permasalahan publik. Ketidakpastian kolektif tentang bagaimana kelompokkelompok berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah, dengan kata lain berbagi- bagi dalam mengurangi resiko.

3. Dimensi ketiga merupakan dinamika kolaborasi yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: *principled engagement*, *shared motivation* dan *capacity for joint action*.

b. Sampah

Sampah merupakan benda ataupun bahan dari hasil buangan kegiatan masyarakat di lingkungan rumah tangga, pasar, perkantoran, perhotelan, tempat wisata maupun dari hasil buangan dari tempat industri sebuah perusahaan. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, hasil dari sampah tidak selalu dari hasil manusia saja, tetapi dari proses alam yang berbentuk padat. Dalam penggolongannya sampah ini bersifat padat terdiri dari zat organik yang dianggap sudah tidak digunakan lagi dan sebaiknya di kelola agar tidak menimbulkan bahaya pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Di negara industri, jenis sampah dan yang dianggap sejenis sampah, dikelompokkan berdasarkan sumbernya seperti:

1. Pemukiman: berupa apartemen atau rumah. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan, plastik, kertas, tekstil, kulit, sampah kebun, kaca, kayu, logam, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya dan sebagainya
2. Daerah komersial: meliputi pertokoan, pasar, rumah makan, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, kayu, plastik, sisa makanan, logam, limbah berbahaya dan beracun, kaca dan sebagainya
3. Institusi: yaitu sekolah, rumah sakit, pusat pemerintahan, penjara, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan sama dengan jenis sampah pada daerah komersial
4. Konstruksi dan pembongkaran bangunan: meliputi pembuatan konstruksi baru, perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kayu, baja, beton, debu, dan lain-lain
5. Fasilitas umum: seperti penyapuan jalan, pantai, taman, tempat rekreasi, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain rubbish, ranting, sampah tanaman, daun, dan sebagainya.

Pembagian yang lain sampah dari negara industri antara lain berupa:

1. Sampah organik mudah busuk (garbage): sampah sisa dapur, sampah sisa sayur, sisa makanan, dan kulit buah-buahan

2. Sampah organik tak membusuk (rubbish): mudah terbakar (combustible) seperti plastik, kertas, dsb dan tidak mudah terbakar (non-combustible) seperti kaleng, logam, gelas
3. Sampah sisa abu pembakaran penghangat rumah (ashes)
4. Sampah bangkai binatang (dead animal): bangkai tikus, anjing, ikan, dan binatang ternak
5. Sampah sapuan jalan (street sweeping): sisa-sisa pembungkus dan sisa makanan, kertas, daun
6. Sampah buangan sisa konstruksi (demolition waste), dsb.

Sampah yang berasal dari tempat tinggal atau pemukiman dan daerah komersial, selain terdiri dari sampah organik dan anorganik, juga berkategori B3. Sampah organik yang mudah terdekomposisi sehingga bersifat biodegradable, sedangkan sampah anorganik sulit terdekomposisi sehingga bersifat non-biodegradable. Sampah organik sebagian besar terdiri atas sisa makanan, kardus, kertas, plastik, karet, tekstil, kayu, kulit dan sampah kebun. Sampah anorganik sebagian besar terdiri dari kaca, logam, terkilbar dan debu. Sampah yang mudah terdekomposisi, terutama dalam cuaca yang panas, biasanya dalam proses dekomposisinya menimbulkan bau juga mendatangkan lalat.

c. Pengelolaan Sampah

Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir (Tangguh Perdana Putra, Sidharta Adyatma 2016). Menurut Aboejoewono, 1985 menggambarkan secara sederhana tahapantahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara (Bastiaans 1984).
- b. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu. Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara (TPS/Dipo).
- c. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu. Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA).
- d. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Pengelolaan sampah, terutama di kawasan perkotaan, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbulan sampah yang tinggi, kepedulian masyarakat (human behaviour) yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah (final disposal) yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dari penelitian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil
1	Bagus Nuari Harmawan	2016	Collaborative Governance dalam program pengembangan nilai budaya daerah	Kerjasama antaran dinas kebudayaan dan pariwisata dengan penyelenggara

			melalui Banyuwangi Ethno Carnival	Carnival terjalin dengan beberapa cara, seperti adanya dialog tatap muka, membangun kepercayaan.
2	Tika Mutiarawati dan Sudarmo	2017	Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan	Didalam penelelitian ini sama sama menggunakan Collaborative Governance dalam mengatasi masalah yang ada
3	Denny Irawan	2017	Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)	Dalam Penelitian ini menggunakan kriteria keberhasilan yang sama dalam penelitian yang akan dilakukan. Tapi pada hasilnya ada beberapa yang belum berhasil untuk mengendalikan pencemaran udara.
4	Miftahul Solikhin, Tjitjik Rahaju	2019	Collaborative Governance dalam upaya Pemberdayaan Penyandang Tunagrahita Melalui Budidaya Ikan Lele di Desa Karangpatihan	Adanya peran dari pemerintah desa setempat yang berperan aktif dalam program budidaya ikan lele untuk tunagrahita`

			Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	
5	Sujiyanto	2016	Analisis Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Malang	Faktor pendorong dari berjalannya bank sampah di dalam artikel analisis ini adalah dari adanya faktor pemerintah, masyarakat dan swasta
6	Prisa Ambar Shentika	2016	Pengelolaan Bank Sampah di Kota Probolinggo	Kurangnya kepedulian masyarakat dengan adanya bank sampah membuat kinerja dari bank sampah di daerah daerah dalam probolinggo kurang maksimal. Ini disebabkan kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah setempat.
7	Ranggi Ade Febrina	2016	Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan	Ada beberapa konteks dalam Collaborative Governance dalam pembangunan perdesaan yang belum berjalan

8	Lina Maria Ulfa	2018	Collaborative Governance Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Di Surabaya	Terdapat dua tahapan dalam penyediaan ruang terbuka hijau, yakni merencanakan anggaran, desain wilayah dan menyediakan lahan.
9	Hanna Fauziah	2018	Analisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung	Sama dengan Penelitian yang akan dijalankan, di dalam penelitian ini menggunakan Collaborative dalam pengelolaan.
10	Abdul Fatah dan Supardi Ibrahim	2018	COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEMANDIRIAN DESA (Studi pada Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo)	Dalam prosesnya untuk mewujudkan kemandirian desa ini sangat sulit dikarenakan belum adanya syarat dalam teori ansell and gash yaitu partisipasi, kesetaraan kekuasaan dan kompetensi aktor

Penelitian terdahulu pada tabel diatas digunakan peneliti untuk acuan pada bab selanjutnya. Di dapati adanya persamaan maupun perbedaan dengan penelitian diatas dengan penelitian sekarang. Persamaan maupun perbedaan itu terletak pada fokus nya penelitian diatas terhadap Collaborative Governance. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian

sekarang adalah pada penelitian sekarang akan lebih fokus terhadap Proses Pengelolaan sampah dengan perspektif Collaborative Governance.

G. Definisi Konseptual

Dalam definisi konseptual harus memberikan penjelasan dengan singkat dan jelas mengenai sebuah konsep yang akan digunakan sebagai suatu perspektif dalam penelitian. Definisi konseptual adalah gambaran dari penggunaan konsep konsep yang mendefinisikan suatu konstruk dengan konstruk lainnya. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki beberapa konsep yang berkaitan dalam penelitian, diantaranya adalah :

1. *Collaborative Governance* adalah usaha dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada di publik dengan cara bekerjasama ataupun kemitraan bersama-sama dengan masyarakat, instansi, swasta yang ada untuk meningkatkan kualitas program yang sedang dilakukan. Dengan ini dapat diartikan bahwa program atau kegiatan yang sedang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan dapat mengusung kepentingan masing masing instansi dalam mencapai tujuan bersama.
2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau dalam arti sebagai acuan ataupun pedoman dalam pelaksanaan sebagaimana mestinya variabel dapat diukur. Untuk memudahkan menganalisa data maka penulis memberikan batasan-batasan dan alat ukur dengan maksud untuk menjawab masalah penelitian. Dari teori Stephen Balogh dkk yaitu menggunakan dimensi dimensi Framework Collaborative Governance akan menentukan variabel untuk memudahkan peneliti untuk menjawab masalah.

a. Dimensi Collaborative Governance:

1. System Context

Ada beberapa indikator yang dapat memudahkan menganalisa dalam penelitian ini, adapun indikatornya adalah:

Indikator	Variable/Parameter
a. Sumber daya yang dimiliki b. Kebijakan dan Kerangka Hukum c. Pembelajaran di Masa Lalu d. Dinamika Politik e. Jaringan Terkait	a. Memiliki sumber daya, yakni ketersediaan keuangan, teknis, manusia maupun sumber daya yang lain, sehingga dapat menunjang kolaborasi yang akan dijalankan dalam pengelolaan sampah a. Mengacu pada kebijakan pemerintah sehingga dapat tercipta kolaborasi yang baik. a. Menemukan masalah yang ada pada awal kolaborasi sehingga dapat menjadikan intropeksi pada kolaborasi yang akan di jalankan. a. Mengikuti adanya politik yang terjadi, sehingga dapat menjadi tameng dalam melakukan kolaborasi yang sedang dijalankan.

<p>f. Tingkat Kepercayaan</p>	<p>a. Perjanjian antara Pemerintah-Swasta-LSM yang diwujudkan dalam pengelolaan sampah</p> <p>b. Penguatan kelembagaan/kolaboratif antar para stakeholders (rapat koordinasi, rapat bersama antar para stakeholders)</p> <p>a. Dalam hal ini profesionalitas antara pelaksana kolaborasi harus memiliki kepercayaan, sehingga dapat terlaksananya program kerja atau kebijakan dari masing masing stakeholders</p>
-------------------------------	--

I. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Karena dalam prosesnya, penelitian kualitatif lebih mendalam dalam memperoleh hasil maupun data dari proses penelitian. Sehingga dalam proses penelitian kualitatif ini tidak adanya hal hal yang dipersempit yang dijadikan sebagai variabel numerik seperti penelitian kuantitatif. Maka dari itu peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dimana pada penelitian ini akan menggambarkan objek penelitian sesuai dengan fakta fakta yang ada di lapangan, serta untuk melihat bagaimana proses dalam kolaborasi yang terjadi.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dalam penelitian ini adalah Kampung Kitiran Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Alasan pemilihan lokasi untuk penelitian adalah mempermudah peneliti untuk memperoleh data selain itu akan melibatkan penanggung jawab di Kampung Kitiran.

d. Sumber Data

Penelitian mengenai Pengelolaan Sampah dalam Persepektif Collaborative Governanve memerlukan data dari beberapa sumber untuk memperoleh informasi guna mendukung pada penelitian ini. oleh karena itu sumber data menjadi penting untuk penelitian. Menurut Purhantara, sumber data dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari obyek penelitian, peneliti memperoleh hasil dari wawancara bersama informan maupun narasumber dengan menggunakan teknik Purposive, yaitu mencari subyek kunci yang berkaitan dengan penelitian. Dengan adanya teknik ini nantinya peneliti mempunyai subyek kunci yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Dinas Lingkungan Hidup Surakarta, Masyarakat Kampung Kitiran, serta Komunitas Kresek Solo sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO).

2. Data Sekunder

Setelah itu ada Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan memperoleh data dari laporan, jurnal atau data lainnya yang sudah siap. Dalam penelitian ini dibutuhkan data sekunder yang relevan dengan penelitian ini (Purhantara W 2010).

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini adalah berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Untuk mempermudah dalam mengumpulkan sebuah data adalah dengan menggunakan beberapa alat pembantu seperti alat perekam, draf wawancara maupun alat elektronik lainnya. Pengumpulan data kali ini lebih fokus terhadap observasi, dan wawancara yang mendalam serta dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui keberadaan objek secara luas satori komariah 2014. Dalam prosesnya, dibutuhkan sebuah alat pembantu untuk mempermudah penelitian ini berjalan. Menurut usman dan akbar dalam observasi diperlukan alat bantu seperti daftar catata atau alat elektornik seperti alat perekam (Usman 2009).

Menurut Bandurterdapat dua jenis observasi yang signifikan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, yakni observasi partisipan (participant observation) dan observasi langsung (direct observation). Teknik pengumpulan data kualitatif melalui observasi langsung sangat relevan untuk mendapatkan pola perilaku dan peristiwa yang dibutuhkan untuk mendalami masalah penelitian (Bandur Agustinus 2016).

2. Wawancara Mendalam

Metode Penelitian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara yang mendalam dimana dalam penggunaannya wawancara mendalam sangat signifikan untuk memahami lebih mendalam tentang persepsi di suatu individu terhadap fenomena yang tengah diteliti. Dalam wawancara yang akan dilakukan saya sebagai peneliti, ingin mengetahui bagaimana proses pengelolaan sampah yang ada di Kampung Kitiran, sehingga dapat mencapai keberhasilan. Ada beberapa narasumber yang harus di wawancara yaitu Dinas Lingkungan Hidup Di Surakarta, Stakeholer di sekitar lingkungan Kampung kitiran maupun yang ada di Surakarta, dan masyarakat ataupun penanggung jawab di Kampung Kitiran Surakarta.

3. Analisis Dokumen

Analisis dokumen sering digunakan dalam beberapa studi setudi sejarah. Didalam penelitian kualitatif, peneliti diharapkan memiliki dokumen dokumen yang telah didapatkan

dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi yang tertulis untuk menelusuri masalah penelitian yang sedang dijalankan. Dokumen yang umum dalam penelitian kualitatif yang dapat dijadikan instrumen pada penelitian adalah jurnal harian, dokumen formal, undangan, hasil hasil keputusan, maupun dari dokumen dokumen pemerintah seperti Undang Undang dan Peraturan Pemerintah. Menurut Satori dan Komariah, peneliti dapat memperoleh suatu informasi bukan dari narasumber saja, tetapi memperoleh informasi bisa dari macam macam sumber tertulis dari dokumen dokumen terdahulu (Satori, D. A., & Komariah 2014).

f. Teknik Penyajian dan Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif (interactive model) Miles and Huberman. Data dikumpulkan dalam bentuk transkrip dari hasil wawancara dan catatan reflektif untuk memberikan gambaran, suasana, sikap, dan emosi dari responden, kemudian dilakukan editing. Data dikelompokkan dalam unit-unit kecil berupa kata, kalimat atau paragraf dan merangkum kembali dalam kategori-kategori tertentu.

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan semua langkah-langkah analisis data dari Miles dan Huberman, diantaranya reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009:148) menjelaskan bahwa ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti jelaskan terkait proses analisisinteraktif yang dilakukan dalam penelitian ini yang meliputi:

Adapun langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Satori dan Komariah (2014:218-220):

1. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Mereduksi data menurut Satori dan Komariah (2014:218) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari yang diperlukan. Pada langkah ini peneliti mengelompokkan data penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Data yang dikelompokkan yaitu data yang menjelaskan tentang

proses terjadinya collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kampung Kitiran.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data dari hasil penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif yang terletak pada BAB selanjutnya. Dengan menyajikan data menggunakan teks naratif bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan hasil penelitian.

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Satori dan Komariah (2014:218) Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel. Data yang sudah dikumpulkan selama penelitian dan sudah melalui langkah reduksi data kemudian peneliti simpulkan berdasarkan pemahaman dan interpretasinya.